



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



POKOK-POKOK PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2012

KAMIS , 19 APRIL 2012





POKOK BAHASAN



1

LATAR BELAKANG APBN-P 2012

2

POKOK-POKOK PERUBAHAN APBN 2012

3

**TANTANGAN PENYESUIAN HARGA BBM DAN RISIKO
PENUNDAANNYA**



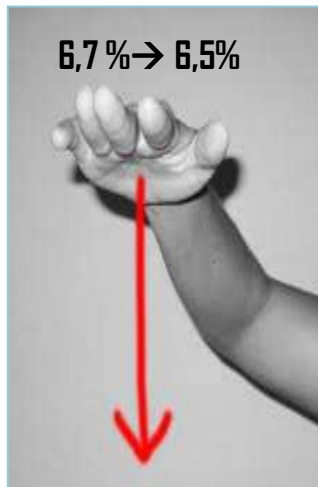
Latar Belakang APBN-P 2012



Pemicu perubahan APBN 2012

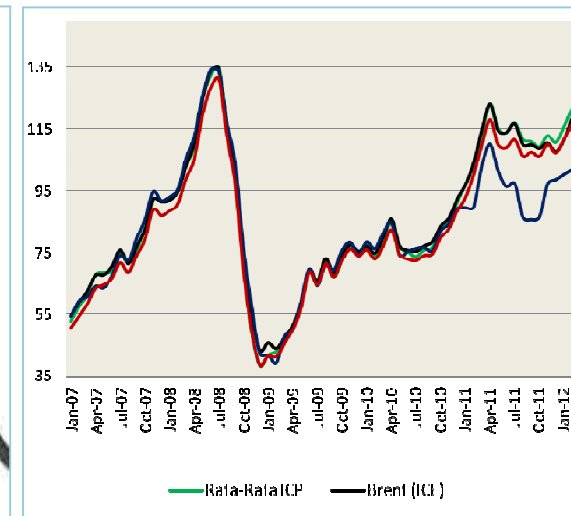


Krisis Global → perlambatan pertumbuhan ekonomi

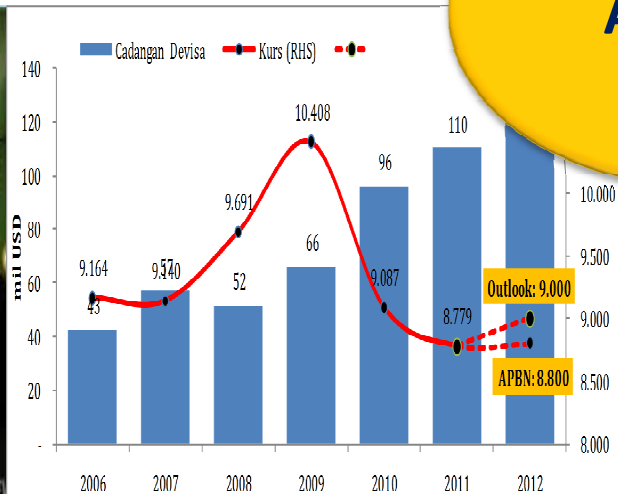


	2011*	2012			
		IMF		Worldbank	
		Sep '11	Jan '12	Jun '11	Jan '12
Dunia	3.8	4.0	3.3	3.6	2.5
Negara Maju	1.6	1.9	1.2	2.7	1.4
Amerika Serikat	1.8	1.8	1.8	2.9	2.2
Eropa	1.6	1.1	-0.5	1.8	-0.3
Negara Berkembang	6.2	6.1	5.4	6.2	5.4
China	9.2	9.0	8.2	8.7	8.4
ASEAN 5	4.8	5.6	5.2		

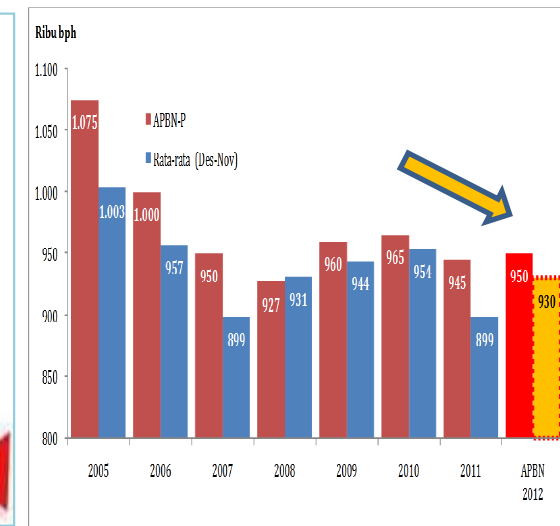
Krisis Geopolitik → Peningkatan ICP



**Trigger
APBN-P
2012**



Krisis Global → Ketidakpastian picu depresiasi Rp



Potensi tidak tercapainya lifting minyak



Krisis Global berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi regional dan domestik



	2011*	2012			
		IMF		Worldbank	
		Sep'11	Jan '12	Jun '11	Jan '12
Dunia	3.8	4.0	3.3	3.6	2.5
Negara Maju	1.6	1.9	1.2	2.7	1.4
Amerika Serikat	1.8	1.8	1.8	2.9	2.2
Eropa	1.6	1.1	-0.5	1.8	-0.3
Negara Berkembang	6.2	6.1	5.4	6.2	5.4
China	9.2	9.0	8.2	8.7	8.4
ASEAN 5	4.8	5.6	5.2	n.a.	n.a.

Sumber: WEO IMF, WB, Jan 2012

- Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat dari 4% menjadi 3,3% tahun 2012 IMF).
- Eropa diperkirakan mengalami kontraksi di tahun 2012
- Maret 2012, Pemerintah China merevisi proyeksi pertumbuhannya dari 8,0% menjadi 7,5% , sementara India dari 7,5% menjadi 6,9%

Proyeksi pertumbuhan Indonesia 2012

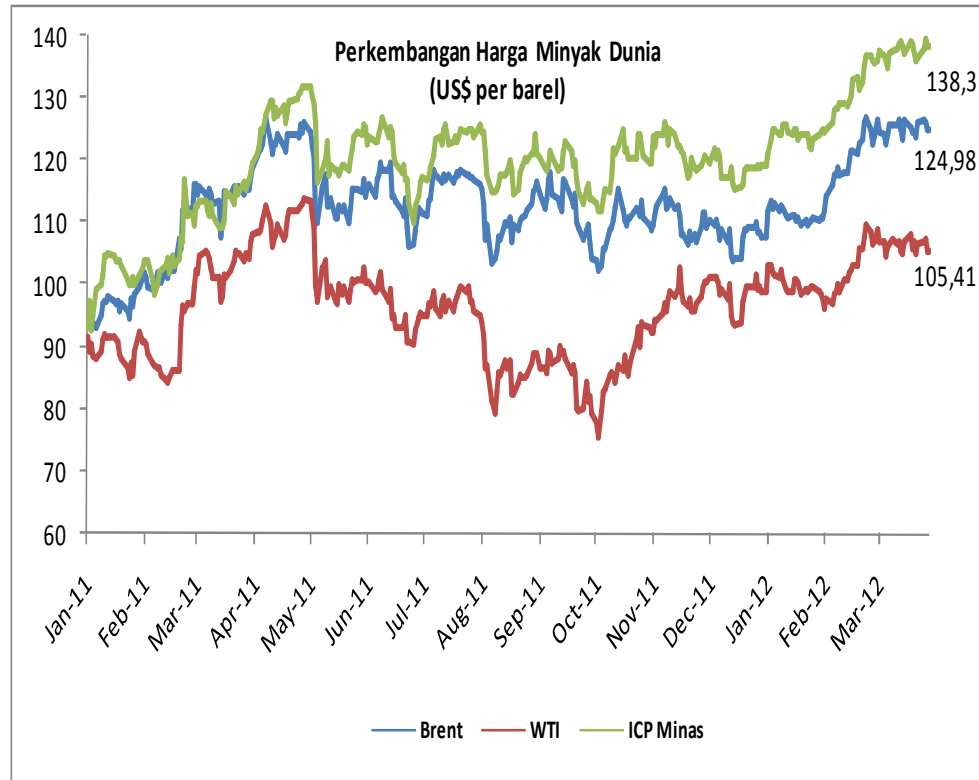
	Sep 2011	'Feb 2012
Danareksa Securities	6,3	6,3
Bank Danamon	6,7	6,3
Citigroup	6,3	6,3
ING	6,5	6,5
BBVA	6,4	6,2
HSBC Economics	6,8	6,1
BofA - Merrill Lynch	-	6,0
Econ Intelligence Unit	6,3	5,9
Credit Suisse	5,5	5,9
IHS Global Insight	5,9	6,2
Standard Chartered	7,0	5,8
Goldman Sachs Asia	6,2	5,4
OCBC Bank	5,3	5,6
JP Morgan Chase	-	5,2
Mandiri Sekuritas	6,7	6,2
Nomura	7,0	5,4
WORLDBANK ¹⁾	6,5	6.2
IMF	6.3	6.1
ADB ²⁾	6,8	6.5

1) Juni 2011 – Januari 2012

2) September 2011 - Desember 2011



Kondisi geopolitik di Timur Tengah dan terganggunya distribusi minyak di Selat Hormuz diperkirakan telah memberikan tekanan terhadap peningkatan harga minyak dunia pada 2012



	WTI	Brent	ICP Minas
6-Jan-12	101,56	113,06	124,93
13-Jan-12	98,70	110,87	124,68
20-Jan-12	98,46	109,63	124,27
27-Jan-12	99,56	110,72	123,46
3-Feb-12	97,84	114,28	125,00
10-Feb-12	98,67	117,47	129,06
17-Feb-12	103,24	121,35	132,90
24-Feb-12	109,49	126,65	136,70
1-Mar-12	107,07	123,81	135,98
9-Mar-12	107,40	125,83	137,68
16-Mar-12	107,06	126,40	136,94
29-Mar-12	105,41	124,98	138,30

- Harga minyak di tahun 2012 masih tertekan dan lebih tinggi dibandingkan 2011.
- Hal ini sejalan dengan terganggunya lalu lintas minyak di selat Hormuz yang merupakan jalur distribusi sekitar 17 juta barel minyak per hari pada 2011 atau seperenam minyak mentah global.
- Di samping itu, terjadi gangguan signifikan seperti masalah geopolitik di Sudan, Suriah dan Yaman, dan masalah teknis di Kanada dan Laut Utara, dan rendahnya persediaan minyak OECD.



Realisasi ICP 2012 mengalami deviasi dari Asumsi APBN 2012....



Realisasi ICP

	ICP	WTI	BRENT
Realisasi			
Des-10	91.4	89.2	91.5
Jan-11	97.1	89.4	96.3
Feb-11	103.3	89.7	104.0
Maret-11	113.0	102.9	114.0
April-11	123.4	110.0	123.1
Mei-11	115.2	101.3	114.5
Juni-11	113.8	96.3	113.8
Juli-11	117.2	97.3	116.5
Agustus-11	111.7	86.2	109.7
September-11	111.0	85.6	112.2
Oktober-11	109.3	86.4	109.5
November-11	112.9	97.2	110.5
Desember-11	110.7	98.6	107.7
Januari-12	115.9	100.3	111.5
Februari-12	122.2	102.3	119.1
Maret -12	128.0	106.2	124.9
Rata-Rata			
Jan-Maret 2012	122.0	102.9	118.5

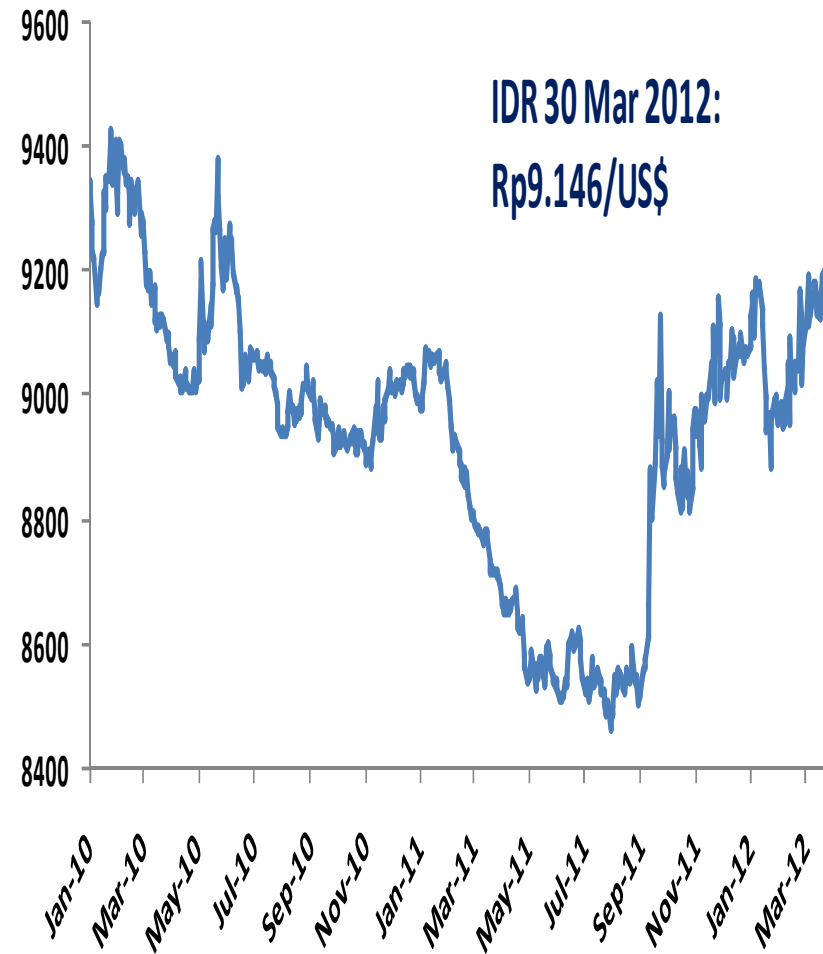
- ICP (US\$/barel)
APBN 2012 (90 US\$/barrel) → Desember 2011- Maret 2012 (119,2) atau deviasi sebesar 32,4%
→ Januari 2012- Maret 2012 : 90 → 122,0 (deviasi 35,5%)



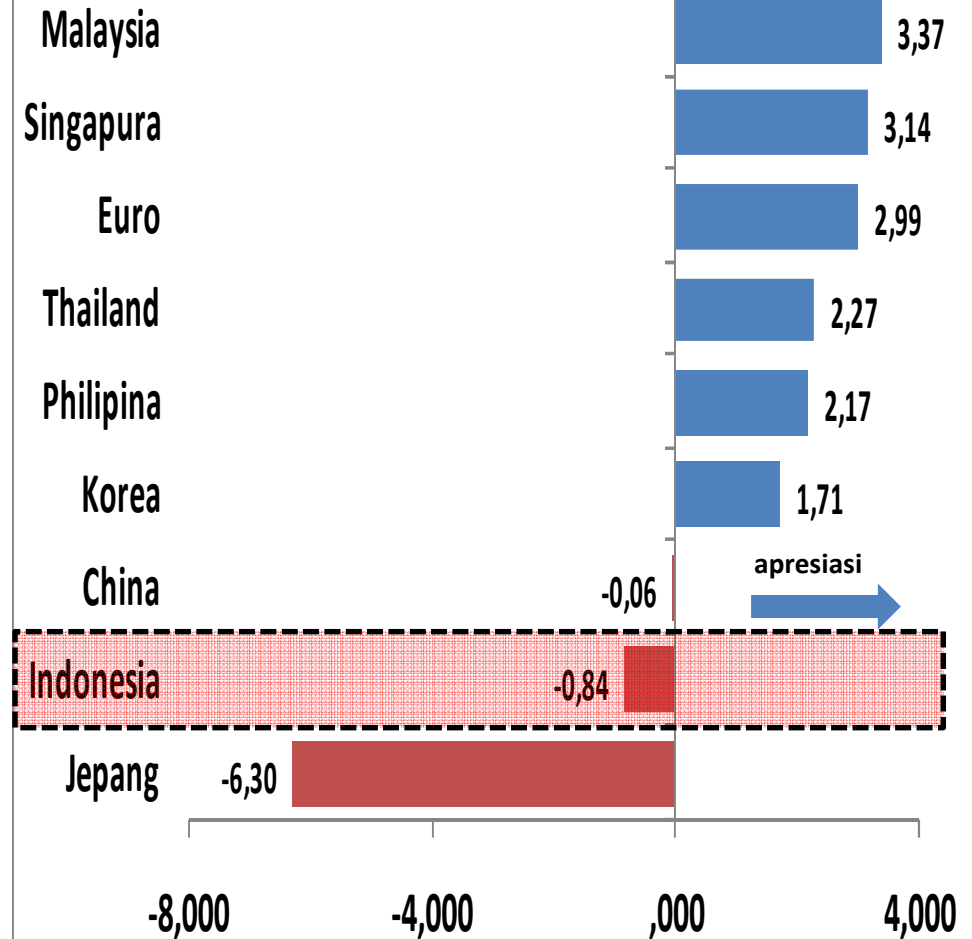
Rupiah masih mengalami pelemahan menyusul meningkatnya ekspektasi terhadap inflasi



Nilai Tukar Rupiah per 30 Mar 2012



Nilai TukarRegional per 30 Mar 2012 (% ytd)

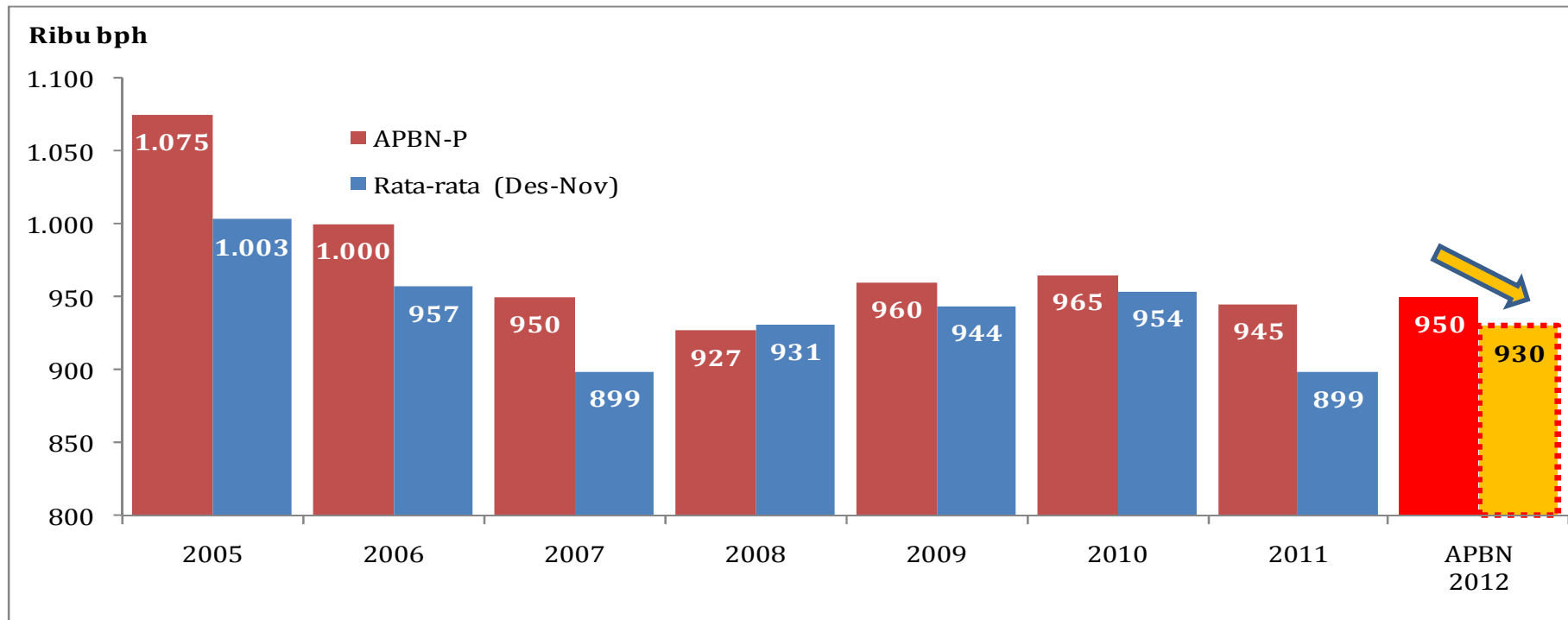




Realisasi *lifting* minyak cenderung lebih rendah dari targetkan



Perkembangan Lifting Minyak (ribu barel per hari)



- Realisasi rata-rata *lifting* minyak Periode Desember 2010 – November 2011 hanya mencapai 899 ribu barel per hari dari target 945 ribu barel per hari (APBN-P 2011), atau jauh lebih rendah dari rata-rata realisasi Desember 2009 – November 2010 sebesar 954 ribu barel per hari.
- Berdasarkan perkembangan terakhir realisasi lifting bulan Januari yang hanya mencapai 884 ribu barel per hari, maka dari target lifting dalam APBN semula 950 ribu barel per hari, diperkirakan menjadi 930 ribu barel per hari.



Dasar Pertimbangan Perlunya Perubahan Terhadap APBN Tahun 2012



1. PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO 2012:

Sejak ditetapkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011, terdapat berbagai perkembangan pada perekonomian domestik dan eksternal yang menyebabkan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN 2012, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian, sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi : 6,7% → 6,5%;
- b) Inflasi 5,3% → 6,8%;
- c) Kurs: Rp8.800 → Rp9.000/US\$;
- d) Suku Bunga SPN 3 bulan: 6,0% → 5,0%
- e) Harga Minyak (ICP): US\$90 → US\$105/barel
- f) Lifting : 950 ribu bph → 930 ribu bph

2. PERUBAHAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL:

- a) Perubahan Parameter dan Besaran Subsidi Energi;
- b) Tambahan Anggaran Belanja Mendesak dan Prioritas;
- c) Efisiensi belanja melalui pemotongan belanja K/L;
- d) Pelebaran Defisit Anggaran dari 1,5% PDB menjadi 2,23% dari PDB.

3. PERGESERAN ANGGARAN ANTAR-KEGIATAN DAN ANTAR-JENIS BELANJA:

- a) Pergeseran Anggaran dari Bagian Anggaran (BA) 999 menjadi BA KL
- b) Pergeseran Anggaran Antar-Kegiatan, dan Antar-Jenis Belanja.

4. PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) UNTUK PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN:

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan akibat pelebaran Defisit dan pemanfaatan SAL untuk stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur, diperlukan tambahan penggunaan SAL.



Kebijakan Umum APBN-P 2012



- Menjaga sustainabilitas fiskal dan meningkatkan daya tahan fiskal ditengah ketidakpastian ekonomi global;
- Memperbaiki efisiensi ekonomi;
- Meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi;
- Menjaga daya beli masyarakat; dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Asumsi Ekonomi Makro 2012



Uraian	2011		2012	
	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.5	6.5	6.7	6.5
- Inflasi	5.7	3.8	5.3	6.8
- Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)	5.6	4.8	6.0	5.0
- Nilai Tukar (Rp/US\$1)	8,700	8,779	8,800	9,000
- Harga Minyak (US\$/barell) ²⁾	95	111.5	90	105
- Lifting Minyak (ribu barell per hari)	945	898	950	930



Ringkasan APBN-P 2012



Triliun Rp

Uraian	2011		2012		Selisih thd APBN	
	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Nominal	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1,169.9	1,199.5	1,311.4	1,358.2	46.8	3.6
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,165.3	1,196.9	1,310.6	1,357.4	46.8	3.6
1. Penerimaan Perpajakan	878.7	872.6	1,032.6	1,016.2	(16.3)	(1.6)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	286.6	324.3	278.0	341.1	63.2	22.7
II. Hibah	4.7	2.6	0.8	0.8	-	-
B. Belanja Negara	1,320.8	1,289.6	1,435.4	1,548.3	112.9	7.9
I. Belanja Pemerintah Pusat	908.2	878.3	965.0	1,069.5	104.5	10.8
- Belanja K/L	461.5	402.6	508.4	547.9	39.5	7.8
- Belanja Non K/L	446.8	475.7	456.6	521.6	65.0	14.2
II. Transfer Ke Daerah	412.5	411.4	470.4	478.8	8.4	1.8
C. Keseimbangan Primer	(44.3)	3.1	(1.8)	(72.3)	(70.5)	3,912.4
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(150.8)	(90.1)	(124.0)	(190.1)	(66.1)	53.3
% to GDP	(2.1)	(1.3)	(1.5)	(2.23)	(0.7)	45.8
E. Pembiayaan	150.8	129.3	124.0	190.1	66.1	53.3
I. Pembiayaan Dalam Negeri	153.6	148.5	125.9	194.5	68.6	54.5
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(2.8)	(19.2)	(1.9)	(4.4)	(2.5)	133.9
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	-	39.2	(0.0)	-	-	-

- Kebijakan defisit lebih ekspansif meningkat dari 1,5% → 2,23% PDB;
- Kebijakan yang ekapansif diarahkan (i) menjaga kesinambungan fiskal, (ii) meningkatkan efisiensi ekonomi, (iii) tetap stimulasi perekonomian, (iv) menjaga daya beli, (v) meningkatkan kesejahteraan;
- Untuk menutup defisit dipenuhi terutama dari SAL dan penerbitan SBN.



Penerimaan Perpajakan APBN-P 2012



dalam Triliun

Item	2011			2012			
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Selisih thd APBN	
						Nominal	Persen
a. Pajak Dalam Negeri	827,2	831,7	819,6	989,6	968,3	(21,3)	(2,2)
1) Pajak Penghasilan	420,5	432,0	431,1	520,0	513,7	(6,3)	(1,2)
- PPh Non Migas	364,9	366,7	358,0	459,0	445,7	(13,3)	(2,9)
- PPh Migas	55,6	65,2	73,1	60,9	67,9	7,0	11,5
2) Pajak Pertambahan Nilai	312,1	298,4	277,7	352,9	336,1	(16,9)	(4,8)
3) Pajak Bumi dan Bangunan	27,7	29,1	29,9	35,6	29,7	(6,0)	(16,7)
4) BPHTB	-	-	(0,0)	-	-	-	-
5) Pajak Lainnya	4,2	4,2	3,9	5,6	5,6	-	-
6) Cukai	62,8	68,1	77,0	75,4	83,3	7,8	10,4
b. Pajak Perdagangan Internasional	23,0	46,9	54,1	42,9	47,9	5,0	11,7
1) Bea Masuk	17,9	21,5	25,2	23,7	24,7	1,0	4,2
2) Bea Keluar	5,1	25,4	28,9	19,2	23,2	4,0	20,9
TOTAL	850,3	878,7	873,7	1.032,6	1.016,2	(16,3)	(1,6)



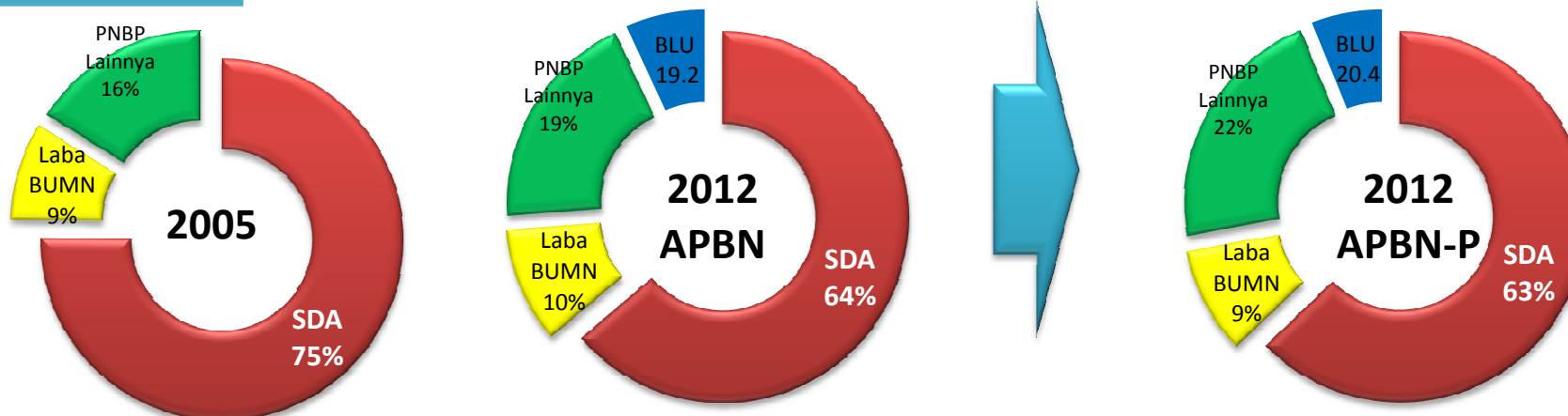
Penerimaan Negara Bukan Pajak APBN-P 2012 meningkat terutama penerimaan Migas seiring kenaikan ICP



dalam Triliun

Uraian	2011			2012			
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Selisih thd	
						Nominal	Persen
a. Penerimaan SDA	163.1	192.0	214.0	177.3	217.2	39.9	22.5
1) SDA Migas	149.3	173.2	193.4	159.5	198.3	38.8	24.4
- Minyak bumi	107.5	123.1	141.2	113.7	150.8	37.2	32.7
- Gas bumi	41.8	50.1	52.2	45.8	47.5	1.7	3.7
2) Non-migas	13.8	18.8	20.6	17.8	18.8	1.1	5.9
- Perikanan	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-	-
- Kehutanan	2.9	2.9	3.2	3.0	3.1	0.1	4.1
- Pertambangan umum	10.4	15.4	16.7	14.5	15.3	0.8	5.7
- Panas bumi	0.4	0.4	0.6	0.2	0.3	0.1	49.7
b. Bagian Laba BUMN	27.6	28.8	28.2	28.0	30.8	2.8	9.9
c. PNBP Lainnya	45.2	50.3	68.6	53.5	72.8	19.3	36.1
d. Pendapatan BLU	15.0	15.4	10.4	19.2	20.4	1.2	6.1
TOTAL	250.9	286.6	321.2	278.0	341.1	63.2	22.7

Komposisi (%)



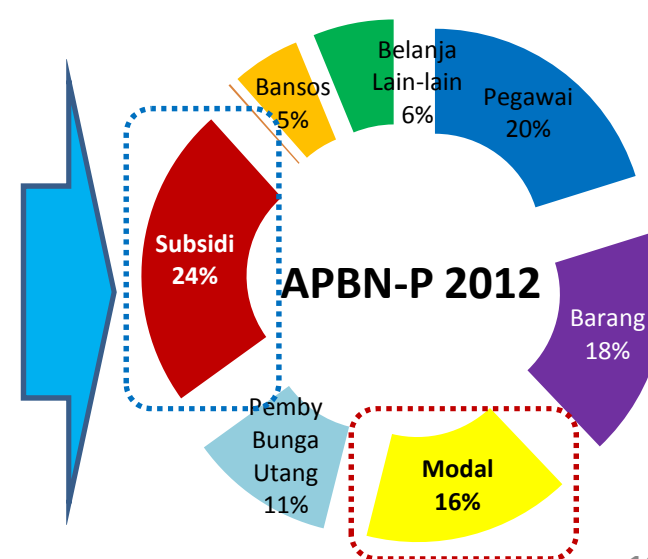
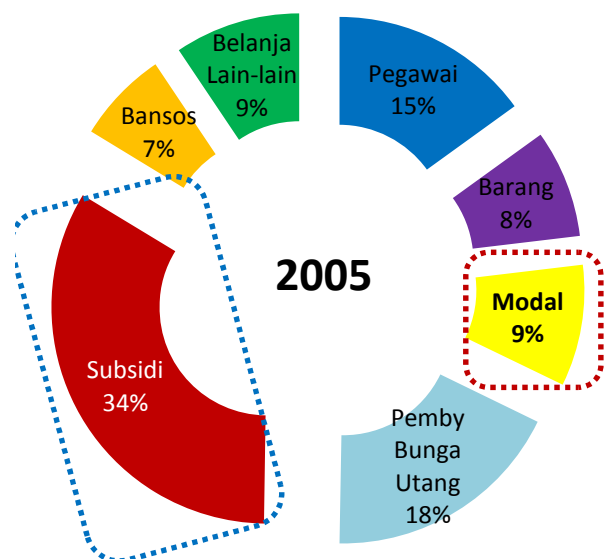


Belanja Pemerintah Pusat APBN-P 2012



dalam Triliun

Uraian	2011		2012		Selisih	
	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Nominal	%
Belanja Pemerintah Pusat	908.2	878.3	965.0	1,069.5	104.5	10.8
- Belanja K/L	461.5	402.6	508.4	547.9	39.5	7.8
- Belanja Non K/L	446.8	475.7	456.6	521.6	65.0	14.2
1. Belanja Pegawai	182.9	175.5	215.9	212.3	(3.6)	(1.7)
2. Belanja Barang	142.8	121.0	188.0	186.6	(1.4)	(0.8)
3. Belanja Modal	141.0	115.9	152.0	168.7	16.7	11.0
4. Pembayaran Bunga Utang	106.6	93.3	122.2	117.8	(4.4)	(3.6)
5. Subsidi	237.2	294.9	208.9	245.1	36.2	17.3
6. Belanja Hibah	0.4	0.3	1.8	1.8	(0.0)	(0.3)
7. Bantuan Sosial	81.8	70.9	47.8	55.4	7.6	15.9
8. Belanja Lain-lain	15.6	6.5	28.5	65.5	37.0	129.7



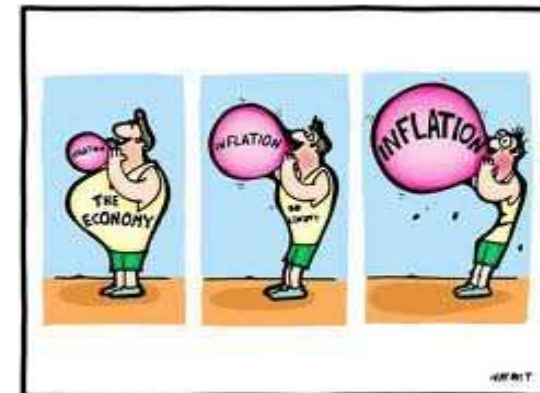


Pemanfaatan SAL & Program Kompensasi Perubahan Besaran Subsidi untuk mengantisipasi dampak kenaikan inflasi



Pemanfaatan SAL dalam APBN-P 2012 → Rp29.8 T, untuk:

- Peningkatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun;
- Anggaran pendidikan (menambah dana pengembangan pendidikan nasional/*endowment fund*) sebesar Rp6,0 triliun pada pos pembiayaan anggaran;



Program Kompensasi Perubahan Besaran Subsidi → Rp30,6T

- Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)** sebesar Rp17.1 T (termasuk *safeguarding*);
 - BLSM diberikan untuk 18,5 Juta RTS dengan durasi 6 bulan sebesar Rp150.000/bln/RTS;
- Kompensasi angkutan umum** sebesar Rp5,0 T (termasuk *safeguarding*), terdiri atas:
 - Tambahan subsidi pemerintah untuk kapal penumpang, KA Ekonomi, ASDP Perintis, dan Bus Perintis sebesar Rp0,3 T
 - Bantuan Pemeliharaan Kendaraan berupa fasilitas ban dan suku cadang sebesar Rp1,9 T:
 - Fasilitas Pembebasan Biaya Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp0,95 T
 - Fasilitas Subsidi Bunga Pinjaman Perbankan (Program khusus pinjaman perbankan untuk angkutan umum) sebesar Rp1,9 T.
- Infrastruktur Perdesaan** sebesar Rp7,9 T (termasuk *safeguarding*) Cakupan sekitar 28.300 Desa tertinggal → Rp250 juta/desa;
- Program Keluarga Harapan (PKH)** Rp0,6 T (termasuk *safeguarding*).
Digunakan untuk meningkatkan unit *cost* PKH.



Kebijakan Subsidi BBM Tahun 2012



- Tidak ada kenaikan harga jual BBM bersubsidi pada tanggal 1 April 2012.
- “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan (realisasi harga rata-rata ICP selama 6 bulan terakhir) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari **15%** dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya
- Melakukan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi.
- Melaksanakan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
- Melanjutkan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg untuk daerah yang belum terkonversi.
- Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN).



Pokok-Pokok Kesepakatan Subsidi Energi



SUBSIDI BBM

- Subsidi BBM disepakati sebesar Rp137,4 T, dengan basis perhitungan volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter, yang terdiri dari:
 - Premium dan biopremium sebesar 24,41 juta KL;
 - Kerosene sebesar 1,7 juta KL;
 - Solar dan biodiesel sebesar 13,89 juta KL.
- Volume LPG bersubsidi 3 kg sebesar 3,61 juta ton;
- Subsidi bahan bakar nabati (BBN) untuk jenis biodiesel sebesar Rp3.000 per liter dan jenis bioethanol sebesar Rp3.500 per liter;
- Alpha BBM bersubsidi rata-rata sebesar Rp641,94 per liter; dan
- Subsidi LGV sebesar Rp1.500 per liter.



SUBSIDI LISTRIK

- Besaran Anggaran Subsidi Listrik tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp65,0 triliun, yang berarti turun Rp28,1 triliun dari usulan RAPBN-P 2012 sebesar Rp93,1 triliun (termasuk rencana pembayaran tunggakan subsidi listrik tahun 2011 sebesar Rp3,5 triliun). Namun disepakati dana cadangan risiko energi sebesar Rp 23 triliun. Penurunan beban anggaran subsidi listrik tahun 2012 tersebut, disebabkan oleh:
 - a. penyesuaian COD PLTU Batubara, pemotongan biaya operasi, dan pemeliharaan lainnya;
 - b. penurunan penggunaan gas (dari semula 372,5 TBTU menjadi 351,5 TBTU);



Tantangan Penyesuaian Harga BBM dan Resiko Penundaannya



Mengapa perlu penyesuaian harga BBM ?



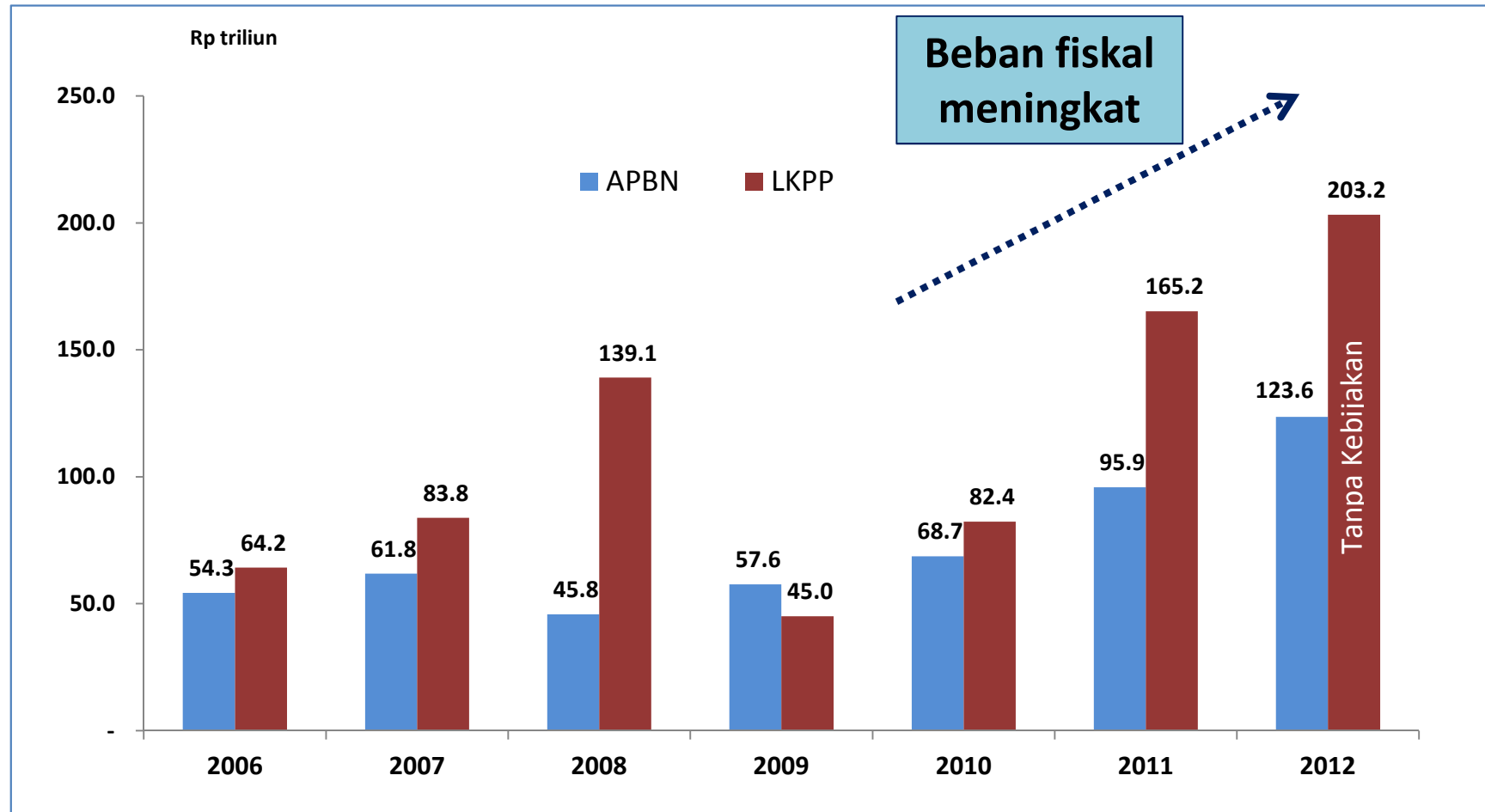
From Inefficiency for productivity and fairness

Alasan pokok penyesuaian harga BBM:

- **Menyelamatkan** APBN 2012 dan sekaligus *menyehatkan* APBN ke depan
 - Tanpa penyesuaian defisit naik di atas 3% dari PDB (diatas batas atas yang diizinkan oleh UU No 17/2003)
- Kunci penting untuk mendorong **diversifikasi** energi dari BBM ke sumber energi lain (bagian dari kebijakan energi).
 - Tanpa penyesuaian harga BBM, energi lain tidak attraktif.
- Bagian dari upaya **redistribusi** pendapatan untuk mewujudkan **keadilan**
 - Sebagian besar subsidi BBM dinikmati oleh kelompok menengah ke atas
- saving dari subsidi BBM dapat digunakan untuk **mengupgrade** infrastruktur



Tanpa kebijakan pengendalian , Subsidi BBM akan terus memicu Ketidakpastian Fiskal



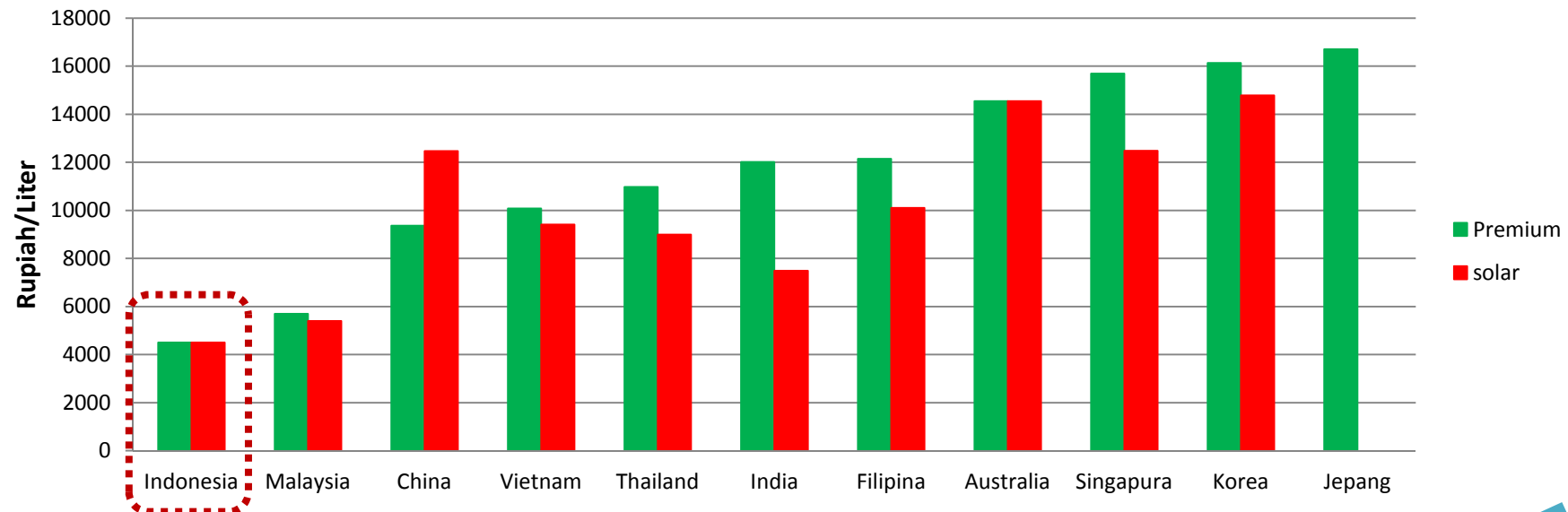
Tanpa ada kebijakan, Subsidi BBM tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp203T dengan tingkat konsumsi BBM bersubsidi sekitar 47 juta kl.



Harga Premium dan Solar di Indonesia masih relatif murah



Perbandingan Harga Premium dan Solar Bulan Maret 2012 di Beberapa negara



Keterangan:

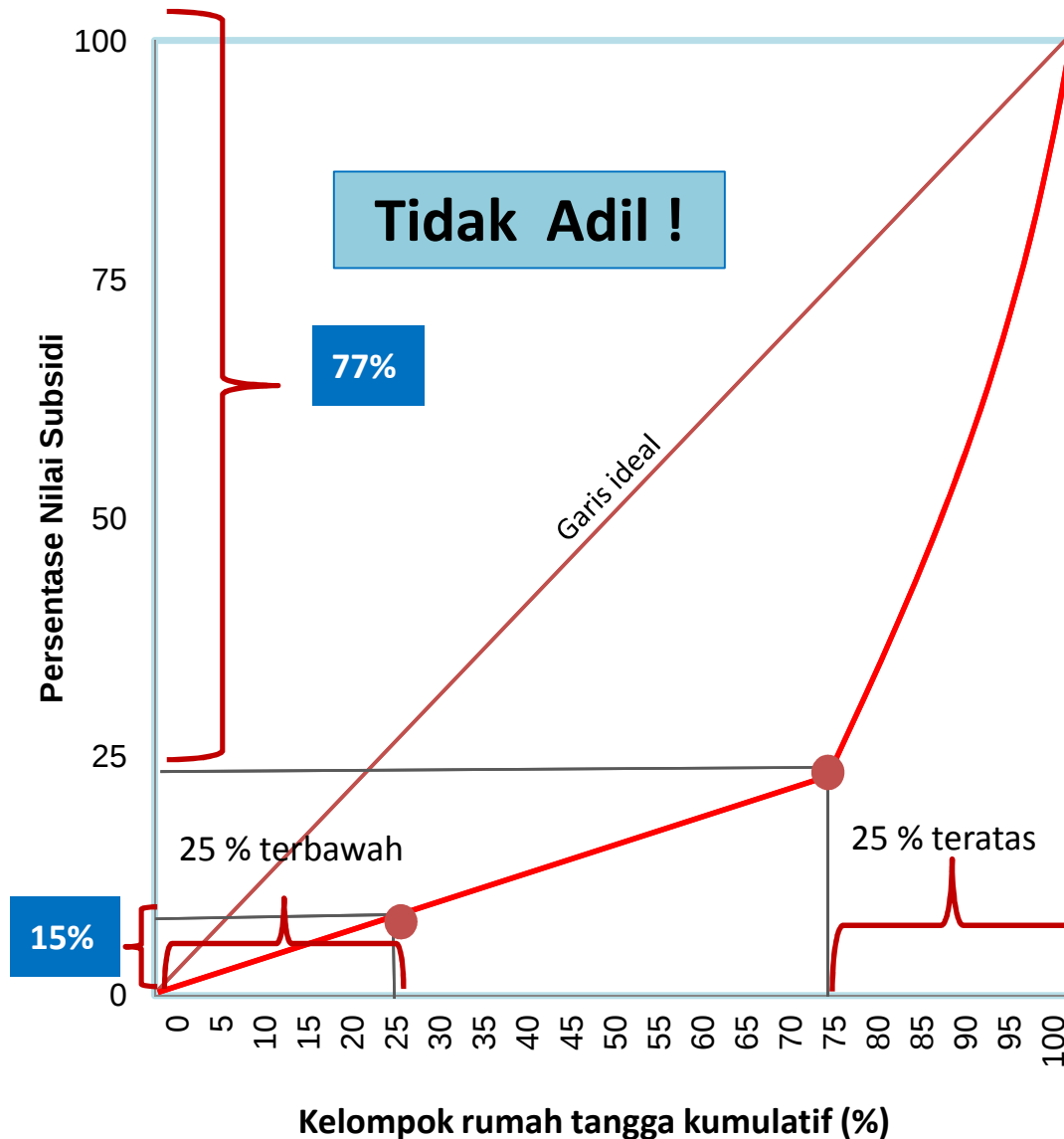
1. Data kurs diambil dari Bank Indonesia dan sumber lain per 13 Maret 2012.
2. Data harga solar dan premium diambil dari berbagai sumber.
3. Data harga solar di Jepang tidak diketahui.

Sangat Murah

Dengan penyesuaian hingga Rp 6000/liter pun, harga BBM kita masih tergolong murah



Subsidi BBM tidak tepat sasaran



- 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%.
- Sementara kelompok 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%.
- **Terjadi ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi BBM**

Sumber : diestimasi dari Susenas 2008 dan Bank Dunia 2010

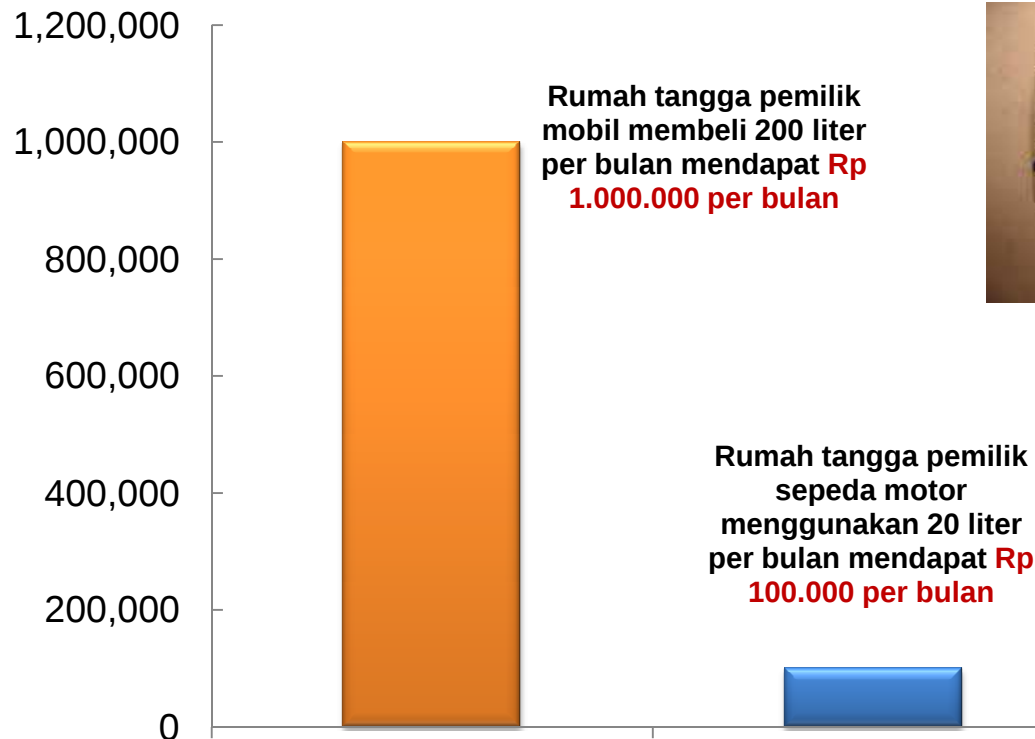


Menurunkan subsidi bukan hanya mengendalikan Defisit tetapi yang terpenting mewujudkan **Keadilan**



Membandingkan manfaat yang diterima jenis rumah tangga yang berbeda dari subsidi BBM

Manfaat subsidi per bulan (Rp)



Manfaat subsidi per bulan (Rp)



Rumah tangga tanpa mobil dan sepeda motor menerima manfaat tidak langsung dari harga transportasi dan harga lain yang rendah: sekitar **Rp 10.000 per bulan**

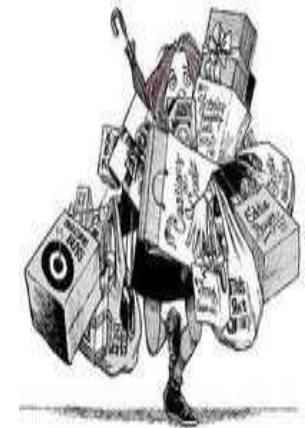
- Sumber: Harga ekonomi BBM dari ESDM dan Bank Dunia



Penyesuaian harga BBM merupakan pengendali volume konsumsi BBM agar cadangan minyak tidak cepat habis



- **Elastisitas pendapatan Premium: 1.22**
 - Artinya: setiap kenaikan 1% pendapatan, akan meningkatkan konsumsi Premium sebesar 1.22%.
 - Bila GDP 2012 naik 6.5%, maka akan menyebabkan konsumsi Premium naik sebesar 7,9%.
 - *PUSH factor*
- **Elastisitas harga sendiri Premium: -0.16**
 - Artinya: setiap kenaikan 1% harga, akan menurunkan konsumsi Premium sebesar 0.16%.
 - Bila harga Premium naik 33%, maka akan menyebabkan konsumsi Premium turun sebesar 5,3%.
 - *PULL factor*



Price

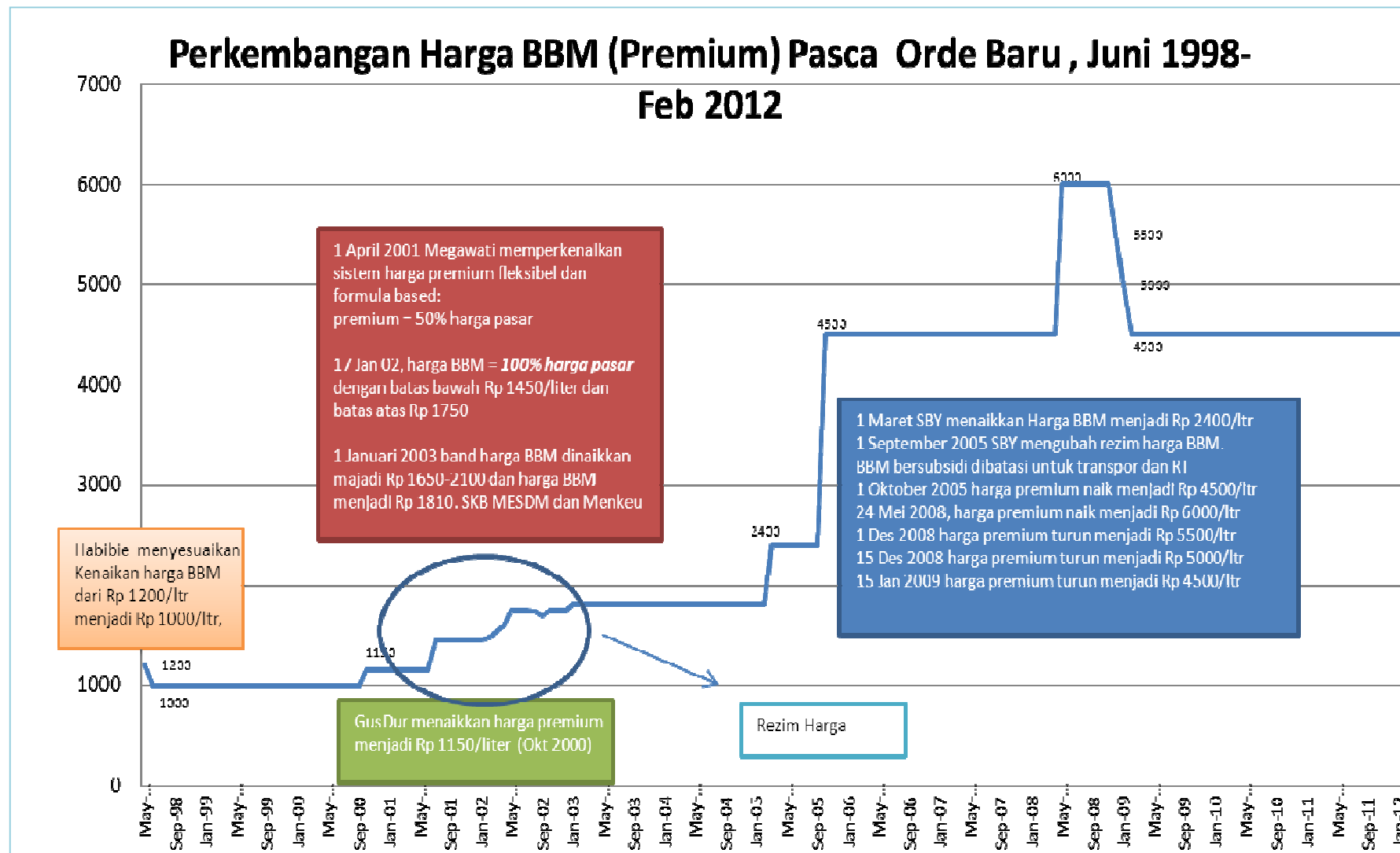


Quantity





Dalam tekanan fiskal yang kuat dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Sementara kondisi ekonomi masyarakat jauh lebih baik, Penyesuaian harga BBM menjadi sangat rasional

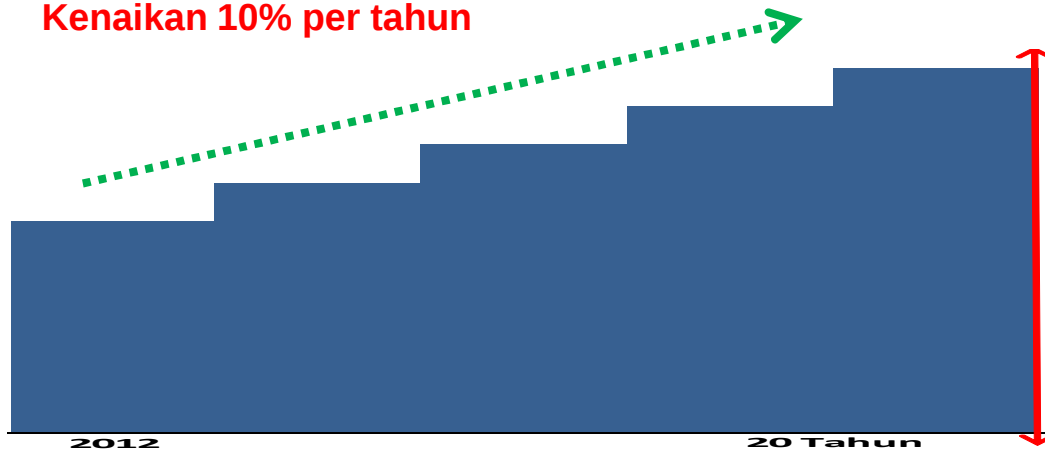




Risiko Cadangan Minyak Lebih Cepat Habis



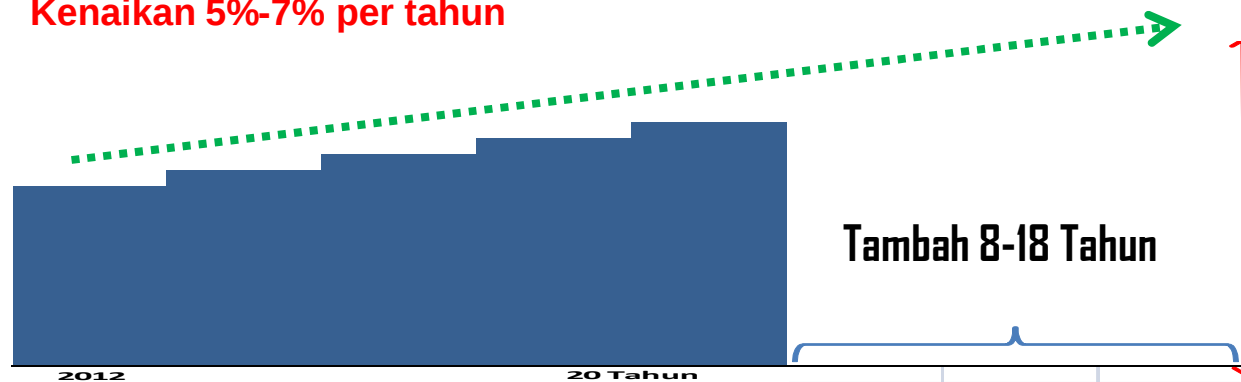
Kenaikan 10% per tahun



Cadangan Minyak Habis

Tanpa Kebijakan → Konsumsi BBM Bersubsidi rata-rata meningkat 10% per tahun sehingga diperkirakan cadangan minyak akan habis dalam 20 tahun

Kenaikan 5%-7% per tahun



Cadangan Minyak Habis

Dengan Kebijakan → pola konsumsi BBM Bersubsidi lebih terkendali, sehingga peningkatan volume pada kisaran 5% – 7 % per tahun sehingga minyak dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama menjadi 28 -38 tahun



Walaupun terjadi penundaan Kenaikan Harga BBM namun masih menyimpan optimisme bagi perekonomian



1. Pengambilan keputusan dilakukan secara dinamis dan demokratis → **stabilitas politik dan stabilitas ekonomi**



2. Pencantuman Pasal 7 ayat 6a menjadi katub pengaman APBN → memberi **fleksibilitas Pemerintah** untuk melakukan penyesuaian apabila deviasi ICP mencapai *Threshold* (15%);

3. Sudah mempersiapkan **bantalan (*Fiscal buffer*)** apabila penyesuaian harga benar-benar diimplementasikan → program kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.





Penundaan kenaikan harga BBM juga menyimpan risiko



1. Berkurangnya kesempatan untuk mengarahkan agar belanja negara lebih produktif dan berkualitas



2. Berkurangnya kesempatan untuk menghemat cadangan minyak



3. Berkurangnya kesempatan untuk menekan praktek penyelundupan BBM

5. Menambah beban subsidi per bulan
Rp4 T - Rp5,5 T



4. Berkurangnya kesempatan untuk mengarahkan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan



6. Berkurangnya kesempatan untuk menambah belanja infrastruktur terutama untuk memenuhi akses masyarakat miskin

7. Berpotensi mereduksi program konservasi lingkungan



Fiscal Buffer



Untuk mengantisipasi ketidaksesuaian realisasi subsidi energi, misalnya akibat tertundanya kenaikan atau tidak terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun 2012, ketidaksesuaian asumsi makro, over quota volume BBM bersubsidi, Pemerintah masih memiliki *fiscal buffer* sbb:

- Cadangan risiko energi
- Cadangan risiko perubahan asumsi makro (ICP, lifting minyak) dan stabilisasi harga pangan
- Anggaran program kompensasi perubahan besaran subsidi yang akan diberikan jika terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi
- Pemberian Raskin sesuai APBN 2012 (pemberian Raskin menjadi 13 kali, bukan 14 kali)
- Pemanfaatan SAL untuk menutup kekurangan subsidi
- (Cadangan) Belanja Pegawai



Kesimpulan



Meskipun keputusan DPR tidak seperti yang diharapkan, namun keputusan tersebut lebih baik dari kondisi APBN 2012, yaitu:

- Pemerintah telah memiliki katup pengaman untuk menyelamatkan APBN melalui kebijakan menaikkan harga BBM.
- DPR menyepakati dana cadangan risiko energi
- Kebijakan fiskal di bidang belanja negara seperti pemanfaatan SAL untuk belanja infrastruktur, pemotongan belanja, dll disetujui DPR → pelaksanaan belanja menjadi lebih baik, dan dapat membantu dalam mengendalikan defisit anggaran



TERIMA KASIH

